BUKU AJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Penerbit: Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383883
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

BUKU AJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

BUKU AJAR

PUSTAKA PELAJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Penyusun:
Septi Nur Wijayanti, S. H., M. H.
Nanik Prasetyoningsih, S. H., M. H.

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2019

BUKU AJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

BUKU AJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Penyusun:
Septi Nur Wijayanti, S. H., M. H.
Nanik Prasetyoningsih, S. H., M. H.

PUSTAKA PELAJAR

FAKULTAS HUKUM
UMY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

BUKU AJAR

PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Disusun oleh :
Septi Nur Wijayanti, S. H., M. H.
Nanik Prasetyoningsih, S. H., M. H.

Cetakan ke 1, Oktober 2019

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-623-236-027-3

KATA PENGANTAR

Buku PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ini merupakan buku yang mengkaji dan menjabarkan kehidupan ketatanegaraan dalam tataran praktis. Buku ini merupakan pengembangan dari buku yang berjudul Politik Ketatanegaraan. Materi dalam buku ini meliputi teori demokrasi dan praktek demokrasi formal di Indonesia. Demokrasi formal yang dijalankan di Indonesia selama ini mengalami perkembangan baik dari konsep demokrasi itu sendiri dan konteks demokrasi dari masa awal Indonesia merdeka hingga pada era milenial. Demokrasi Indonesia berproses menyesuaikan perubahan konstitusi, politik hukum, dan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis.

Demokrasi merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara. Demokrasi yang menjadi bintang pemandu baik bagi para penyelenggara negar maupun warga negara untuk berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi politik Indonesia adalah metode deduktif, yaiku cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik untuk permasalahan yang bersifat khusus. Dalam buku ini diungkapkan gambaran secara umum terlebih dahulu, baru digambarkan situasi dan kondisi di negara Indonesia, sehingga pembaca diharapkan dapat memberikan analisis terhadap politik ketatanegaraan di Indonesia setelah melihat fenomena secara umum. Demokrasi ditempatkan pada pembahasan awal buku ini, dikarenakan kedudukan konstitusional demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Demokrasi harus diwujudkan dan harus dijalankan, sehingga pembahasan selanjutnya adalah mengenai demokrasi formal dalam bentuk pelaksanaan pemilihan umum yang dideskripsikan sejak dari sejarah pemilu di Indonesia sampai

implementasi pemilu, berikut dengan penyelenggara pemilu dan penyelesaian hasil pemilu.

Buku ini selain diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari politik ketatanegaraan Indonesia, juga dapat menjadi referensi yang baik bagi para pemerhati perkembangan politik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR > v
DAFTAR ISI > vii

BAB I
SISTEM POLITIK INDONESIA > 1
A. Sistem Politik > 1
B. Struktur Politik > 8
C. Mekanisme Sistem Politik > 9
D. Fungsi Politik > 41
E. Proses politik > 43
F. Sistem Politik Indonesia > 44
G. Evaluasi > 52

BAB II
PERKEMBANGAN
KONSEP DEMOKRASI > 55
A. Makna Dan Hakekat Demokrasi > 55
B. Perkembangan Konsep Demokrasi > 64
C. Demokrasi Konstitusional > 66
D. Negara Hukum Islam > 69
E. Evaluasi > 72

BAB III
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
DEMOKRASI INDONESIA > 75
A. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia > 75
B. Demokrasi di Indonesia > 76
C. Sistem Pemerintahan Indonesia > 88
D. Evaluasi > 98

BAB IV
HUKUM PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM > 101
A. Pengertian Pemilu > 101
B. Tujuan Pemilu > 115
C. Fungsi Pemilu > 116
D. Sistem Pemilu > 118
E. Konsep Pemilihan Umum Dalam Islam > 123
F. Evaluasi Materi > 127

BAB V
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA > 129
A. Sejarah Pemilu Indonesia > 129
B. Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah > 163
C. Pemilu Serentak di Indonesia > 174
D. Permasalahan Dalam Pemilu Serentak > 191
E. Pemilihan Kepala Daerah Serentak > 200
F. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum > 207
G. Evaluasi Materi > 211

BAB VI
PENYELENGGARA PEMILU > 213
A. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum > 213
B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) > 220
C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) > 224

DAFTAR PUSTAKA > 227
DAFTAR INDEKS > 236
BIODATA PENULIS > 243

BAB I
SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Sistem Politik

Istilah sistem politik pertama kali dikenalkan oleh David Easton, seorang ilmuwan politik Amerika, dalam bukunya yang berjudul *The Political System*, mendefinisikan sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu masyarakat[1].

Lebih jauh, David Easton memberikan batasan bagi sistem politik yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *1). The political system allocates values (by means of politic); 2) its allocations arre authoritative, and; 3) its authoritative allocations are binding the society as a whole.* Dengan batasan di atas, juga dapat diartikan bahwa sistem politik merupakan alokasi dari nilai-nilai dimana pengalokasiaan nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu, Dahl memberikan pengertian sistem politik sebagai berikut: *a political system is any persistent of power realitonship that involves, the significant extent, power or authority.* Dengan demikian sistem politik menurut Robert A. Dahl mencakup dua hal sebagai berikut: a) pola yang tetap dari hubungan antar manusia, b). melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan aturan-aturan dan kewenangan. Dengan kata lain sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalalm masyarakat merdeka, yang menjalankan

---

[1] Tim Simpul Demokrasi, 2006, R*eformasi Birokrasi dan demokratisasi kebijakan Politik,* Averroes Press, Malang, hlm. 97.